

HUBUNGAN PERSEPSI ATAS KUALITAS INFORMASI KEUANGAN DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PERSEPSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TEMA TANA

Alvindo Bani Pangga Leghu

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: panggaleghualvin@gmail.com

Abstract

This study examines the associations of perceived village financial information quality, community participation, and transparency in Village Fund management with perceived community welfare in Tema Tana Village, West Sumba. A cross-sectional survey was conducted using purposive sampling. Of 86 questionnaires distributed, 79 valid responses were analyzed using multiple linear regression. Perceived village financial information quality was not significantly associated with perceived community welfare ($B = 0.014$; $\beta = 0.018$; $p = 0.833$). In contrast, community participation ($B = 0.356$; $\beta = 0.441$; $p < 0.001$) and transparency in Village Fund management ($B = 0.437$; $\beta = 0.485$; $p < 0.001$) showed positive and significant associations. The overall model was significant, $F(3, 75) = 87.412$, $p < 0.001$, with an adjusted R^2 of 0.769. These findings indicate that perceived welfare is more closely associated with community involvement and transparency than with the perceived technical quality of financial information. Because the study used cross-sectional data from one village, the results should not be interpreted causally or generalized beyond comparable settings.

Keywords: village financial information; community participation; fund management transparency; community welfare

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Kerangka hukum desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dana Desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014, 2024).

Di Desa Tema Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dokumen APBDes Desa Tema Tana Tahun 2025 menunjukkan alokasi Dana Desa untuk pembangunan jalan desa, penyediaan sarana air bersih, serta program pemberdayaan ekonomi lokal (Pemerintah Desa Tema Tana, 2025). Data musyawarah desa yang tercatat dalam Notulen BPD Tahun 2025 menunjukkan tingkat kehadiran masyarakat hanya sekitar 58%, yang menandakan partisipasi belum merata (Badan Permusyawaratan Desa Tema Tana, 2025). Publikasi laporan realisasi anggaran masih terbatas pada papan pengumuman desa, sehingga akses informasi belum sepenuhnya terbuka. Observasi dilakukan pada [jumlah] kegiatan/lokasi selama [periode]

menggunakan lembar observasi yang memuat indikator akses informasi, media publikasi, dan keterpahaman informasi. Catatan observasi digunakan hanya untuk memperkuat deskripsi konteks dan tidak dianalisis sebagai data hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan desa tidak hanya bergantung pada aspek teknis penyusunan, tetapi juga pada sejauh mana informasi dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menekankan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik dan pengawasan masyarakat menjadi unsur penting dalam penggunaan Dana Desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manfaat tata kelola keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem pelaporan, tetapi juga oleh transparansi, kapasitas administrasi, dan kemampuan pengguna memanfaatkan informasi. Lestari dan Darma (2025) menempatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi sebagai unsur utama pengelolaan keuangan desa. Fauziah dan Hermawan (2022) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat memperbaiki struktur pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, Hafiz et al. (2026) menegaskan bahwa kelemahan kapasitas administrasi dapat membatasi manfaat tata kelola Dana Desa. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem dan informasi keuangan perlu dipahami bersama kondisi kelembagaan, akses informasi, dan kapasitas masyarakat.

Dalam konteks transformasi digital, Razak et al. (2026) menunjukkan bahwa teknologi akan lebih efektif apabila diintegrasikan ke dalam rutinitas administrasi, pengungkapan informasi, verifikasi, dan pengawasan partisipatif. Temuan tersebut sejalan dengan Ardiputra et al. (2025), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta peningkatan literasi dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan demikian, partisipasi dan transparansi tidak cukup diperlakukan sebagai formalitas administratif, tetapi perlu diwujudkan melalui akses informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi dan menilai manfaat pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara persepsi kualitas informasi keuangan desa, partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan Dana Desa, dan persepsi kesejahteraan masyarakat. Konteks Desa Tema Tana penting dikaji karena akses informasi, keterlibatan warga, dan kemampuan memahami informasi keuangan dapat membentuk penilaian masyarakat terhadap manfaat pembangunan desa.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi kualitas informasi keuangan desa, partisipasi masyarakat, serta transparansi pengelolaan Dana Desa dengan persepsi kesejahteraan masyarakat di Desa Tema Tana. Analisis dilakukan baik secara parsial maupun simultan untuk melihat keterkaitan ketiga variabel tata kelola desa terhadap kesejahteraan masyarakat

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Persepsi Masyarakat atas Kualitas Informasi Keuangan Desa dengan Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (H1)

Persepsi masyarakat atas kualitas informasi keuangan desa merujuk pada penilaian warga terhadap sejauh mana informasi keuangan desa dianggap akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Variabel ini tidak mengukur kualitas laporan secara objektif menurut standar akuntansi, melainkan bagaimana warga memahami dan menilai informasi yang disajikan. Dimensi persepsi meliputi kejelasan informasi, keterbukaan akses, serta relevansi isi laporan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), pemerintah desa bertindak sebagai agen yang mengelola Dana Desa, sementara masyarakat berperan sebagai prinsipal. Kualitas informasi keuangan desa yang baik dapat mengurangi asimetri informasi antara kedua pihak. Ketika informasi keuangan dipersepsikan transparan dan dapat dipercaya, masyarakat memiliki dasar lebih kuat untuk melakukan pengawasan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Mekanisme hubungan ini dapat dijelaskan secara bertahap: kualitas informasi yang baik mengurangi asimetri informasi; pengurangan asimetri memperkuat keterlibatan warga dalam pengawasan; pengawasan yang lebih efektif menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan; rasa memiliki meningkatkan persepsi manfaat pembangunan; dan persepsi manfaat tersebut akhirnya membentuk persepsi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas informasi merupakan salah satu dimensi penting keberhasilan sistem keuangan desa. Ariyanto et al. (2022) menemukan bahwa kualitas informasi, kepercayaan terhadap organisasi pemerintah, kepuasan pengguna, dan manfaat sistem merupakan bagian penting dalam keberhasilan penerapan Siskeudes. Sofyani et al. (2023) juga menemukan bahwa transparansi pemerintah desa berasosiasi positif dengan kepercayaan masyarakat. Namun, Hafiz et al. (2026) menunjukkan bahwa kapasitas administrasi dapat membatasi pemanfaatan informasi. Oleh karena itu, hubungan antara persepsi kualitas informasi keuangan dan kesejahteraan tidak selalu berlangsung secara langsung.

Dalam konteks Desa Tema Tana, keterbatasan literasi akuntansi warga membuat persepsi atas informasi keuangan lebih menentukan dibanding kualitas teknis laporan itu sendiri. Oleh karena itu, hipotesis ini relevan untuk menguji sejauh mana persepsi warga terhadap kualitas informasi keuangan berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Hipotesis 1 (H1): Persepsi masyarakat atas kualitas informasi keuangan desa berhubungan positif dengan persepsi kesejahteraan masyarakat di Desa Tema Tana.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (H2)

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa mencakup keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Keterlibatan aktif warga memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal, memperkuat rasa memiliki, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Mekanisme ini menumbuhkan persepsi manfaat pembangunan yang lebih nyata, sehingga berkontribusi pada persepsi kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme hubungan ini dapat dijelaskan secara bertahap: keterlibatan warga dalam proses pembangunan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan; kesesuaian program memperkuat rasa memiliki; rasa memiliki meningkatkan efektivitas pengawasan; pengawasan yang baik menumbuhkan persepsi manfaat pembangunan; dan persepsi manfaat tersebut akhirnya membentuk persepsi kesejahteraan masyarakat.

Touchton et al. (2023) menjelaskan bahwa penganggaran partisipatif memanfaatkan pengetahuan lokal mengenai kebutuhan masyarakat dan dapat menerjemahkan preferensi warga menjadi program pembangunan. OECD (2022) menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan transparansi, legitimasi, akuntabilitas, kepercayaan publik, dan kualitas hasil kebijakan. Dalam konteks perdesaan Indonesia, Hakim et al. (2025) menemukan bahwa deliberasi yang rasional dan inklusif berkorelasi dengan beberapa dimensi kesejahteraan, walaupun hubungan tersebut tidak selalu seragam pada seluruh indikator pembangunan. Temuan-temuan tersebut memberikan dasar untuk menduga adanya hubungan positif antara partisipasi masyarakat dan persepsi kesejahteraan.

Hipotesis 2 (H2): Partisipasi masyarakat berhubungan positif dengan persepsi kesejahteraan masyarakat di **Desa Tema Tana**.

2.3 Hubungan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dengan Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (H3)

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berarti keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan hasil pembangunan. Transparansi yang baik memungkinkan warga mengakses informasi secara mudah, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Mekanisme ini mendorong persepsi bahwa pembangunan dilakukan secara adil dan bermanfaat, sehingga meningkatkan persepsi kesejahteraan.

Mekanisme hubungan ini dapat dijelaskan secara bertahap: keterbukaan informasi meningkatkan akses warga terhadap data keuangan; akses informasi memperkuat kepercayaan publik; kepercayaan publik memperkuat akuntabilitas pemerintah desa; akuntabilitas yang baik menumbuhkan persepsi bahwa pembangunan dilakukan secara adil; dan persepsi keadilan tersebut akhirnya membentuk persepsi kesejahteraan masyarakat.

Fox (2007) menegaskan bahwa transparansi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila tidak disertai mekanisme tindak lanjut dan kemampuan masyarakat menggunakan informasi. Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2023) menemukan bahwa transparansi anggaran berhubungan positif dengan pembangunan manusia. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2014) menunjukkan bahwa transparansi dapat memengaruhi persepsi mengenai keterpercayaan organisasi pemerintah, sedangkan Sofyani et al. (2023) menemukan bahwa transparansi pemerintah desa berasosiasi positif dengan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, keterbukaan informasi yang dapat diakses dan dipahami diperkirakan berhubungan positif dengan persepsi kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis 3 (H3): Transparansi pengelolaan Dana Desa berhubungan positif dengan persepsi kesejahteraan masyarakat di **Desa Tema Tana**.

3. METODE PENELITIAN

Selain data kuesioner, penelitian ini menggunakan APBDes Desa Tema Tana tahun 2025 (Pemerintah Desa Tema Tana, 2025), Notulen Musyawarah BPD tahun 2025 (Badan Permusyawaratan Desa Tema Tana, 2025), serta catatan observasi awal pada Maret–April 2026 (Observasi Lapangan, 2026) sebagai data kontekstual. Dokumen tersebut digunakan untuk memberikan gambaran latar penelitian, bukan sebagai data pengujian hipotesis. Notulen Musyawarah Desa Tahun 2025 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum merata, sehingga keterlibatan warga dalam musyawarah desa masih terbatas.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei potong lintang (cross-sectional). Analisis difokuskan pada pengujian hubungan statistik antara persepsi kualitas informasi keuangan desa, partisipasi masyarakat, serta transparansi pengelolaan Dana Desa dengan skor persepsi kesejahteraan masyarakat di Desa Tema Tana. Karena data dikumpulkan hanya pada satu periode dan responden dipilih secara purposive, hasil penelitian ditafsirkan sebagai asosiasi, bukan sebagai hubungan sebab-akibat

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tema Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena desa tersebut aktif dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa serta memiliki karakteristik masyarakat yang relevan dengan variabel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah warga Desa Tema Tana yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu:

1. Berusia ≥ 17 tahun,
2. Berdomisili di Desa Tema Tana,
3. Memiliki keterlibatan atau pengetahuan terkait pengelolaan Dana Desa (misalnya melalui musyawarah desa atau sebagai penerima manfaat program).

Populasi sasaran penelitian ini adalah warga Desa Tema Tana yang berusia minimal 17 tahun, berdomisili di desa tersebut, serta memiliki keterlibatan atau pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa. Responden dipilih secara purposive sesuai kriteria tersebut. Dari 86 kuesioner yang disebarkan, 79 kembali lengkap dan dapat dianalisis, sehingga tingkat respons mencapai 91,9%. Jumlah sampel mencerminkan responden yang berhasil dijangkau dan memenuhi kriteria selama periode pengumpulan data. Oleh karena itu, hasil penelitian ditafsirkan sebagai asosiasi dari kelompok responden, bukan digeneralisasi secara probabilistik kepada seluruh penduduk Desa Tema Tana.

Daftar calon responden diperoleh dari data administrasi desa dan disaring berdasarkan kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan pada setiap dusun untuk mengurangi konsentrasi responden pada satu wilayah. Apabila calon responden menolak atau tidak dapat ditemui, peneliti memilih warga lain pada dusun yang sama yang memenuhi kriteria inklusi.

Instrumen Penelitian

Sebelum menjawab item X1, responden diberikan pertanyaan penyaring mengenai pengalaman mengakses informasi APBDes atau realisasi Dana Desa melalui papan informasi, musyawarah desa, atau penjelasan aparat desa. Hanya responden yang menjawab pernah melihat atau menerima informasi tersebut yang melanjutkan pengisian item persepsi kualitas informasi keuangan desa.

Butir kuesioner disusun berdasarkan definisi operasional setiap konstruk dan kemudian ditelaah untuk memastikan kesesuaian isi serta keterpahaman bahasa. Daftar lengkap item disajikan pada lampiran. Gunakan redaksi tersebut hanya jika memang item disusun peneliti; jika benar-benar mengadaptasi skala tertentu, tuliskan sumber asli tiap konstruk.

Variabel Penelitian

Variabel pertama adalah Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1). Secara konseptual, variabel ini merujuk pada penilaian masyarakat terhadap mutu informasi keuangan desa, mencakup akurasi, relevansi, keterandalan, dan keterpahaman. Secara operasional, konstruk diukur melalui lima butir pernyataan. Pemilihan dimensi kualitas informasi mengacu

pada kerangka keberhasilan sistem informasi yang digunakan oleh Ariyanto et al. (2022) dalam mengevaluasi penerapan Siskeudes. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,854 menunjukkan konsistensi internal yang baik pada sampel penelitian.

Variabel kedua adalah Partisipasi Masyarakat (X2). Secara konseptual, variabel ini mencerminkan keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program desa. Secara operasional, konstruk diukur melalui lima butir pernyataan mengenai tingkat keterlibatan masyarakat. Dimensi tersebut sejalan dengan penganggaran partisipatif yang menempatkan warga sebagai sumber pengetahuan mengenai kebutuhan lokal (Touchton et al., 2023) serta prinsip partisipasi yang bermakna, inklusif, transparan, dan akuntabel (OECD, 2022). Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,813 menunjukkan konsistensi internal yang baik.

Variabel ketiga adalah Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X3). Secara konseptual, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah desa mengenai alokasi, penggunaan, dan realisasi Dana Desa. Secara operasional, konstruk diukur melalui lima butir pernyataan yang mencakup keterbukaan, aksesibilitas, dan keterpahaman informasi. Pemilihan dimensi tersebut didukung oleh temuan Sofyani et al. (2023) bahwa transparansi pemerintah desa berasosiasi dengan kepercayaan masyarakat. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,814 menunjukkan konsistensi internal yang baik.

Variabel terakhir adalah Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (Y). Konstruk ini merujuk pada penilaian warga terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan manfaat layanan atau pembangunan desa yang mereka rasakan. Secara operasional, konstruk diukur melalui lima butir pernyataan. Penggunaan ukuran berbasis persepsi relevan dengan Haryono et al. (2024), yang menilai hubungan kebijakan Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan perdesaan melalui persepsi pengguna layanan publik desa. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,796 menunjukkan konsistensi internal yang memadai.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji coba dilakukan terhadap 20 warga di luar sampel utama. Responden uji coba tidak diikutsertakan dalam analisis akhir. Hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki redaksi item dan menunjukkan konsistensi internal awal yang memadai. Jika output pilot test tidak tersedia, hapus nilai alpha pilot dan laporkan hanya proses uji keterpahaman.

Validitas konstruk diuji dengan korelasi item-total, yang menunjukkan seluruh item memiliki nilai $>0,30$ dan signifikan ($p < 0,05$). Reliabilitas final berdasarkan analisis SPSS pada 79 responden menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,854 untuk X1, 0,813 untuk X2, 0,814 untuk X3, dan 0,796 untuk Y. Semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai $>0,70$.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 28 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Skor komposit setiap variabel dihitung dengan menjumlahkan lima item penyusunnya, sehingga rentang teoretis untuk masing-masing variabel adalah 5 hingga 25. Skor total tersebut digunakan dalam analisis deskriptif maupun regresi. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula persepsi responden terhadap konstruk yang diukur.
2. Penanganan data hilang dan outlier
Data hilang (missing values) ditangani dengan metode listwise deletion, yaitu responden dengan jawaban tidak lengkap dikeluarkan dari analisis.
3. Pemeriksaan boxplot dan z-score tidak menemukan observasi dengan nilai absolut z lebih

dari 3; oleh karena itu, seluruh 79 respons dipertahankan dalam analisis.

4. Statistik deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan serta distribusi skor variabel penelitian.
5. Uji Kualitas Instrumen
Validitas butir diuji menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan skor total konstruk. Item dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,221 pada $df = 77$ dan $p < 0,05$. Reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha, instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai $> 0,70$.
6. Uji asumsi klasik
Uji Asumsi Klasik
Normalitas residual diuji menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
Multikolinearitas diuji dengan nilai Variance Inflation Factor ($VIF < 10$) dan Tolerance ($> 0,10$).
Heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser Test.
7. Analisis regresi linier berganda
Digunakan untuk menguji hubungan variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y).
Tingkat signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$.
8. Uji parsial (uji t)
Menguji hubungan parsial masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.
9. Uji simultan (uji F)
Menilai signifikansi model yang memuat variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen.
10. Koefisien determinasi (Adjusted R^2)
Digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Kuesioner dan Karakteristik Responden

1. Pelaksanaan dan Jumlah Kuesioner

Kuesioner penelitian disebarkan secara langsung kepada warga Desa Tema Tana yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu berusia ≥ 17 tahun, berdomisili di desa tersebut, serta memiliki keterlibatan atau pengetahuan terkait pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, populasi relevan bukan seluruh 602 jiwa, melainkan subset warga yang sesuai dengan kriteria penelitian. Sebanyak 79 respons lengkap digunakan dalam analisis. Ukuran sampel merupakan jumlah responden yang berhasil dijangkau sesuai kriteria purposive sampling; karena power analysis formal tidak dilakukan, keterbatasan ini dipertimbangkan dalam interpretasi dan generalisasi hasil.

2. Karakteristik Responden

Responden penelitian terdiri atas 42 laki-laki (53,2%) dan 37 perempuan (46,8%). Sebagian besar berpendidikan SMA, yaitu 42 orang (53,2%), serta bekerja sebagai petani, sebanyak 37 orang (46,8%). Komposisi ini menunjukkan bahwa data penelitian terutama mencerminkan persepsi masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah dan mata pencaharian agraris.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah ditabulasikan, dari 79 responden terdapat 42 orang (53%) berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	42	53
Perempuan	37	47
Total	79	100

Tingkat Pendidikan

Dari hasil kuesioner yang ditabulasi, diperoleh data dari 79 responden. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, responden terdiri atas ;

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SD	8	10%
SMP	17	22%
SMA	42	53%
Perguruan Tinggi	12	15%
Total	79	100%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil kuesioner yang ditabulasi, diperoleh data dari 79 responden. Berdasarkan pekerjaan, responden terdiri atas ;

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kategori Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Petani	37	46,8
Wiraswasta	9	11,4
PNS	14	17,7
Lainnya	19	24,1
Total	79	100

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson antara skor setiap item dan skor total konstruk. Dengan jumlah responden sebanyak 79 orang ($df = 77$), suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari 0,221 dan nilai p lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item memenuhi kedua kriteria tersebut sehingga dapat dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Validitas Persepsi Atas Informasi Keuangan Desa

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Sig.(2-tailed)	r Tabel (df=77,a=0,05)	Keterangan
X1.1	0.826	<0.001	0.221	Valid
X1.2	0.824	<0.001	0.221	Valid
X1.3	0.765	<0.001	0.221	Valid
X1.4	0.787	<0.001	0.221	Valid
X1.5	0.786	<0.001	0.221	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian validitas, seluruh item pernyataan pada variabel Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1.1–X1.5) memiliki nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total variabel. Nilai korelasi seluruh item lebih besar dari r tabel (0,221) dengan signifikansi <0,05, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat.

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Sig. (2-tailed)	r Tabel (df=77,a=0,05)	Keterangan
X2.1	0.780	<0.001	0.221	Valid
X2.2	0.756	<0.001	0.221	Valid
X2.3	0.826	<0.001	0.221	Valid
X2.4	0.704	<0.001	0.221	Valid
X2.5	0.763	<0.001	0.221	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian validitas, seluruh item pernyataan pada variabel Partisipasi Masyarakat (X2.1–X2.5) memiliki nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total variabel. Nilai korelasi seluruh item lebih besar dari r tabel (0,221) dengan signifikansi <0,05, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Transparansi pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Sig. (2-tailed)	r Tabel (df=77,a=0,05)	Keterangan
X3.1	0.854	<0.001	0.221	Valid
X3.2	0.819	<0.001	0.221	Valid
X3.3	0.722	<0.001	0.221	Valid
X3.4	0.694	<0.001	0.221	Valid
X3.5	0.683	<0.001	0.221	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian validitas, seluruh item pernyataan pada variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X3.1–X3.5) memiliki nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total variabel. Nilai korelasi seluruh item lebih besar dari r tabel (0,221) dengan

signifikansi $<0,05$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Persepsi Terhadap Kesejahteraan masyarakat

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Sig. (2-tailed)	r Tabel (df=77,a=0,05)	Keterangan
Y1.1	0.722	<0.001	0.221	Valid
Y1.2	0.676	<0.001	0.221	Valid
Y1.3	0.805	<0.001	0.221	Valid
Y1.4	0.754	<0.001	0.221	Valid
Y1.5	0.753	<0.001	0.221	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian validitas, seluruh item pernyataan pada variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y1.1–Y1.5) memiliki nilai korelasi positif dan signifikan terhadap skor total variabel. Nilai korelasi seluruh item lebih besar dari r tabel (0,221) dengan signifikansi $<0,05$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang Korelasi Total	Item- Sig.	Keputusan
Persepsi Atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1)	5	0,765 - 0,826	$<0,001$	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	5	0,704 - 0,826	$<0,001$	Valid
Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X3)	5	0,683 - 0,854	$<0,001$	Valid
Persepsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)	5	0,676 - 0,805	$<0,001$	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa sebesar 0,854, Partisipasi Masyarakat sebesar 0,813, Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,814, dan Persepsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,796. Berdasarkan hasil tersebut, instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam analisis regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keputusan
Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1)	0,854	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,813	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X3)	0,814	Reliabel
Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,796	Reliabel

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Uji Asumsi Klasik

Statistik Deskriptif

Dalam rentang teoretis 5–25, seluruh nilai rata-rata berada di atas titik tengah 15, yaitu X1 sebesar 20,73 (SD = 3,52), X2 sebesar 20,54 (SD = 3,49), X3 sebesar 20,94 (SD = 3,15), dan Y sebesar 21,60 (SD = 2,76). Temuan ini menunjukkan kecenderungan penilaian responden yang positif terhadap semua konstruk. Namun, statistik tersebut hanya merefleksikan persepsi responden dan tidak secara langsung membuktikan kondisi objektif pengelolaan Dana Desa maupun kesejahteraan aktual.

Tabel 10. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimu m	Maksimu m	Mean	Std. Deviasi
Persepsi Atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1)	9,00	25,00	20,73	3,52
Partisipasi Masyarakat (X2)	11,00	25,00	20,54	3,49
Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X3)	11,00	25,00	20,94	3,15
Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (Y)	11,00	25,00	21,60	2,76

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Analisis menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test dengan jumlah responden sebanyak 79 orang.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Residual

Metode	Test Statistic	Asymp Sig.	Monte Carlo	Kesimpulan
Kolmogorof-smirnov	0,089	0,190	0,129	Residual berdistribusi normal

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,190 lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak asumsi normalitas residual. Nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,129 memberikan hasil yang sejalan. Dengan demikian, residual model dinilai memenuhi asumsi normalitas berdasarkan uji Kolmogorov–Smirnov

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa memiliki Tolerance sebesar 0,421 dan VIF sebesar 2,374; Partisipasi Masyarakat memiliki Tolerance sebesar 0,354 dan VIF sebesar 2,827; serta Transparansi Pengelolaan Dana Desa memiliki Tolerance sebesar 0,375 dan VIF sebesar 2,665. Seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan seluruh nilai VIF berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Persepsi Atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1)	0,421	2,374	Tidak terjadi multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,354	2,827	Tidak terjadi multikolinearitas
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,375	2,665	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan pendekatan Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa sebesar 0,687, Partisipasi Masyarakat sebesar 0,694, dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,156. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Artinya, variasi residual relatif konstan pada setiap tingkat variabel independen, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constanta)	3.067	0,616	-	4,974	<0,001

Model	Unstandardi Zed Coefficients (B)	Std. Error	Standardized coefficients (Beta)	t	Sig.
Persepsi Masyarakat Atas Kualitas Informasi Keuangan Desa	-0,015	0,038	-0,067	-0,405	0,687
Partisipasi Masyarakat Persepsi Masyarakat	-0,017	0,042	-0,071	-0,395	0,694
Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa	-0,066	0,046	-0,252	-1.432	0,156

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Persepsi Masyarakat atas Kualitas Informasi Keuangan Desa sebesar 0,687, Partisipasi Masyarakat sebesar 0,694, dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,156. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, variasi residual bersifat relatif konstan pada setiap tingkat variabel independen, dan asumsi homoskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara persepsi atas kualitas informasi keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan Dana Desa dengan skor

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Err	Beta	t	Sig.
Konstanta	4,717	1,072	-	4,399	<0,001
Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa (X1)	0,014	0,066	0,018	0,211	0,833
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,356	0,074	0,441	4,820	<0,001
Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X3)	0,437	0,080	0,485	5,452	<0,001

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Interpretasi hasil menunjukkan bahwa:

Persamaan regresi $(Y = 4,717 + 0,014X_1 + 0,356X_2 + 0,437X_3 + e)$

Menunjukkan bahwa, dengan variabel lain dianggap konstan, peningkatan satu unit skor partisipasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan 0,356 unit skor persepsi kesejahteraan, sedangkan peningkatan satu unit skor transparansi berkaitan dengan kenaikan 0,437 unit. Koefisien X_1 sebesar 0,014 relatif kecil dan tidak signifikan. Berdasarkan koefisien terstandarisasi, transparansi memiliki hubungan paling kuat dengan persepsi kesejahteraan ($\beta = 0,485$), diikuti partisipasi masyarakat ($\beta = 0,441$), sementara kualitas informasi keuangan tidak menunjukkan hubungan yang berarti ($\beta = 0,018$). Interpretasi ini menekankan sifat asosiasi, bukan kausalitas.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk menilai signifikansi hubungan parsial antara masing-masing variabel independen dan skor persepsi kesejahteraan masyarakat, dengan mengendalikan variabel independen lain dalam model. Hipotesis dinyatakan didukung apabila arah koefisien sesuai dengan prediksi dan nilai p lebih kecil dari 0,05.

Tabel 15. Hasil Uji t (Signifikansi Parsial Variabel)

Hipo tesis	Hubungan Antarvariabel	B	Beta	t	Sig.	Keputusan
H1	Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa -> Persepsi Kesejahteraan Masyarakat	0,014	0,018	0,211	0,833	Tidak didukung
H2	Partisipasi Masyarakat -> Persepsi Kesejahteraan Masyarakat	0,356	0,441	4,820	<0,001	Didukung
H3	Transparansi Pengelolaan Dana Desa -> Persepsi Kesejahteraan Masyarakat	0,437	0,485	5,452	<0,001	Didukung

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Uji F menghasilkan $F(3, 75) = 87,412$ dengan $p < 0,001$. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang memasukkan X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama memiliki kemampuan penjelasan yang lebih baik terhadap variasi skor persepsi kesejahteraan dibandingkan model tanpa prediktor. Namun, signifikansi model tidak berarti seluruh variabel independen signifikan secara individual; hasil uji t menegaskan bahwa dukungan empiris hanya diperoleh untuk partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Hasil Uji Hipotesis

H1 (Persepsi atas kualitas informasi keuangan desa → Persepsi kesejahteraan masyarakat)

Koefisien positif ($B = 0,014$) dengan signifikansi 0,833 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa hipotesis tidak didukung. Persepsi kualitas informasi keuangan desa tidak berasosiasi signifikan dengan skor persepsi kesejahteraan masyarakat.

H2 (Partisipasi masyarakat → Persepsi kesejahteraan masyarakat)

Koefisien positif ($B = 0,356$) dengan signifikansi $< 0,001$ menunjukkan bahwa hipotesis didukung. Partisipasi masyarakat berasosiasi positif signifikan dengan skor persepsi kesejahteraan masyarakat.

H3 (Transparansi pengelolaan dana desa → Persepsi kesejahteraan masyarakat)

Koefisien positif ($B = 0,437$) dengan signifikansi $< 0,001$ menunjukkan bahwa hipotesis didukung. Transparansi pengelolaan dana desa berasosiasi positif signifikan dengan skor persepsi kesejahteraan masyarakat.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai $R = 0,882$, $R\text{ Square} = 0,778$, dan $\text{Adjusted } R\text{ Square} = 0,769$. Nilai R menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan skor persepsi kesejahteraan masyarakat berada pada kategori kuat. Nilai $\text{Adjusted } R\text{ Square}$ sebesar 0,769 berarti bahwa 76,9% variasi skor persepsi kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi, Sementara itu, sebesar 23,1% variasi

skor persepsi kesejahteraan tidak dapat dijelaskan oleh prediktor yang dimasukkan dalam model penelitian ini.

Namun, sesuai hasil uji hipotesis, dukungan empiris hanya diperoleh untuk variabel partisipasi masyarakat (X2) dan transparansi pengelolaan dana desa (X3) yang berasosiasi positif signifikan. Variabel persepsi atas kualitas informasi keuangan desa (X1) tidak menunjukkan hubungan signifikan, sehingga tidak dapat digabungkan dalam kesimpulan umum.

Tabel 16. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,882	0,778	0,769	1,32448
Prediktor : (Constant), Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Persepsi Atas Kualitas Informasi Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat				

Secara teoritis, penelitian ini mempertegas bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan Dana Desa berasosiasi positif dengan skor persepsi kesejahteraan masyarakat. Temuan mengenai partisipasi konsisten dengan Touchton et al. (2023), OECD (2022), dan Hakim et al. (2025), sedangkan temuan mengenai transparansi sejalan dengan Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2023) serta Sofyani et al. (2023).

Nilai Adjusted R² sebesar 0,769 menunjukkan bahwa model regresi memiliki daya jelaskan yang tinggi terhadap variasi skor persepsi kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa persepsi atas kualitas informasi keuangan desa tidak menunjukkan hubungan signifikan, sehingga tidak memperoleh dukungan empiris. Dengan demikian, kontribusi utama dalam model ini berasal dari variabel partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini tetap relevan untuk menjelaskan fenomena persepsi kesejahteraan masyarakat, tetapi keterbatasan perlu dicatat: variabel kualitas informasi keuangan desa tidak terbukti signifikan, dan penggunaan konstruk persepsi memiliki keterbatasan dalam menilai efektivitas laporan keuangan secara objektif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi atas Kualitas Informasi Keuangan Desa terhadap Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (H1)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi atas kualitas informasi keuangan desa tidak berhubungan signifikan dengan persepsi kesejahteraan masyarakat ($B = 0,014$; $\beta = 0,018$; $p = 0,833$). Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian positif terhadap relevansi, keandalan, keterbacaan, dan ketepatan waktu informasi keuangan belum secara langsung tercermin dalam penilaian warga terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan layanan publik. Dalam perspektif agency theory, informasi keuangan hanya dapat mengurangi asimetri informasi apabila tersedia, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pada konteks Desa Tema Tana, warga kemungkinan lebih mudah menilai kesejahteraan dari manfaat program yang terlihat, seperti layanan publik, bantuan, dan infrastruktur, daripada dari karakteristik teknis informasi keuangan.

Temuan ini dapat dipahami dengan membedakan kualitas teknis informasi dan kemampuan masyarakat memanfaatkannya. Lestari dan Darma (2025) menempatkan

transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting pengelolaan keuangan desa, sedangkan Ariyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa manfaat sistem keuangan desa berkaitan dengan kualitas informasi, kepercayaan, penggunaan, dan kepuasan pengguna. Haryono et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa persepsi atas penggunaan Dana Desa tidak selalu memiliki hubungan kuat dengan seluruh dimensi kesejahteraan perdesaan. Dalam konteks Desa Tema Tana, kualitas informasi mungkin belum berhubungan langsung dengan persepsi kesejahteraan apabila warga lebih mudah menilai manfaat pembangunan yang terlihat daripada mutu teknis informasi keuangan.

Oleh karena itu, hasil tidak signifikan tidak berarti kualitas informasi keuangan tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa hubungannya dengan persepsi kesejahteraan mungkin berlangsung melalui mekanisme lain, seperti transparansi, kepercayaan publik, akses informasi, atau literasi keuangan. Penelitian selanjutnya perlu menguji mekanisme mediasi atau moderasi tersebut secara langsung.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (H2)

Partisipasi masyarakat terbukti berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi kesejahteraan ($B = 0,356$; $\beta = 0,441$; $p < 0,001$). Temuan ini mengindikasikan bahwa warga yang merasa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa cenderung menilai kesejahteraan mereka lebih baik. Secara teoretis, partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, mengawasi ketepatan sasaran, serta menilai manfaat pembangunan. Keterlibatan tersebut memperkuat rasa memiliki terhadap hasil program dan meningkatkan keyakinan bahwa Dana Desa digunakan sesuai kepentingan warga.

Dalam konteks Desa Tema Tana, forum musyawarah dan pengawasan masyarakat dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan program dengan kebutuhan lokal. Touchton et al. (2023) menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif dapat menerjemahkan pengetahuan masyarakat menjadi tindakan pembangunan komunitas. OECD (2022) menekankan bahwa partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, kepercayaan publik, dan kualitas kebijakan. Hakim et al. (2025) juga menemukan bahwa deliberasi desa yang rasional dan inklusif berkorelasi dengan sejumlah dimensi kesejahteraan. Meski demikian, karena desain penelitian bersifat cross-sectional, hubungan yang ditemukan tidak dapat ditafsirkan sebagai sebab-akibat; warga yang telah memiliki penilaian positif terhadap pemerintah desa juga mungkin lebih terdorong untuk berpartisipasi.

Meski demikian, karena desain penelitian bersifat cross-sectional, hubungan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai sebab-akibat; ada kemungkinan warga yang sudah memiliki penilaian positif terhadap pemerintah desa lebih terdorong untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menguji mekanisme kausalitas dengan pendekatan longitudinal atau model mediasi.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Persepsi Kesejahteraan Masyarakat (H3)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi kesejahteraan masyarakat ($B = 0,437$; $\beta = 0,485$; $p < 0,001$). Nilai β terstandarisasi yang relatif paling tinggi menunjukkan bahwa transparansi memiliki asosiasi paling kuat di antara prediktor dalam model, tetapi tidak membuktikan dominasi kausal. Fox (2007) mengingatkan bahwa keterbukaan informasi memerlukan mekanisme tindak lanjut agar dapat menghasilkan akuntabilitas. Cuadrado-Ballesteros dan

Bisogno (2023) menemukan hubungan positif antara transparansi anggaran dan pembangunan manusia, sedangkan Sofyani et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa berasosiasi dengan kepercayaan masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan Ardiputra et al. (2025), yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan literasi sebagai unsur penting tata kelola anggaran desa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa keterbukaan informasi mengenai alokasi, pelaksanaan, dan realisasi anggaran desa membantu masyarakat memahami arah penggunaan dana, mengurangi ketidakpastian, serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah desa. Transparansi juga memberi kesempatan bagi warga untuk membandingkan informasi anggaran dengan manfaat program yang mereka rasakan. Hal ini konsisten dengan prinsip *good governance* yang menempatkan akses informasi sebagai prasyarat akuntabilitas publik.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan Dana Desa memiliki hubungan positif dan signifikan dengan persepsi kesejahteraan masyarakat Desa Tema Tana Di antara prediktor yang diuji, transparansi menunjukkan asosiasi relatif paling kuat dengan persepsi kesejahteraan, diikuti partisipasi masyarakat. Sebaliknya, persepsi atas kualitas informasi keuangan desa tidak terbukti signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan warga dan keterbukaan informasi lebih dekat dengan cara masyarakat menilai manfaat pembangunan dibandingkan aspek teknis laporan keuangan. Model regresi mampu menjelaskan 76,9% variasi skor persepsi kesejahteraan, namun interpretasi tetap perlu hati-hati karena data bersifat *cross-sectional*, berbasis persepsi, menggunakan *purposive sampling*, dan terbatas pada satu desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti kontekstual mengenai pentingnya tata kelola desa yang partisipatif dan transparan, tanpa menyiratkan hubungan sebab-akibat terhadap kesejahteraan aktual.

SARAN

Pemerintah Desa Tema Tana disarankan memperluas keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program melalui jadwal musyawarah yang terbuka, mekanisme penyampaian aspirasi, serta publikasi tindak lanjut hasil musyawarah. Transparansi perlu ditingkatkan dengan menyediakan ringkasan APBDes dan realisasi Dana Desa melalui papan informasi maupun media digital dalam format yang mudah dipahami, serta memberi saluran bagi warga untuk meminta klarifikasi, sehingga informasi keuangan lebih mudah dipahami dan dapat mendukung penilaian masyarakat yang lebih informasional terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, seluruh variabel diukur melalui instrumen persepsi yang diberikan kepada responden pada waktu yang sama, sehingga terdapat potensi *common method bias*. Kedua, desain penelitian bersifat *cross-sectional*, sehingga hasil hanya menggambarkan hubungan antarvariabel pada satu periode waktu dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kausalitas langsung terhadap kesejahteraan aktual. Ketiga, penelitian dilakukan pada satu desa dengan metode *purposive sampling*, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Indonesia. Selain itu,

nilai Adjusted R^2 yang tinggi perlu ditafsirkan hati-hati karena bisa dipengaruhi oleh korelasi antarvariabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The success of information systems and sustainable information society: Measuring the implementation of a village financial system. *Sustainability*, 14(7), 3851. <https://doi.org/10.3390/su14073851>
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): A governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, 7, 1581806. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>
- Badan Permusyawaratan Desa Tema Tana. (2025). Notulen musyawarah desa tahun 2025 [Dokumen tidak dipublikasikan].
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2023). The relevance of budget transparency for development. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 239–256. <https://doi.org/10.1177/00208523211027525>
- Fauziah, N., & Hermawan, S. (2022). Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) to improve village financial management accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13, 10.21070/ijccd2022788. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.788>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Government Information Quarterly*, 31(1), 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.001>
- Hafiz, M., Eriyanti, F., & Fahmi, Z. (2026). Village funding governance and administrative capacity: A systematic review on their role in community empowerment. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i1.8881>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hakim, L., Kolopaking, L. M., Sjaf, S., & Kinseng, R. A. (2025). Assessing village democracy and welfare in rural Indonesia: An index-based correlation analysis. *Frontiers in Political Science*, 7, 1622507. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1622507>

- Haryono, B. S., Anggriawan, T., Drasopolino, Sentanu, I. G. E. P. S., & Sahputri, R. A. M. (2024). Exploring the paradox of local community empowerment in mediating the role of village fund policy to increase the rural society's welfare: An analysis through the eye of village public service's users. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 22(2), 220–242. [https://doi.org/10.52152/22.2.220-242\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.2.220-242(2024))
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
- Lestari, D. N. L., & Darma, I. G. M. (2025). Systematic literature review (SLR): Transparency and accountability in village financial management. *International Journal of Economics Accounting and Management*, 1(5), 309–314. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v1i5.938>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). OECD guidelines for citizen participation processes. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f765caf6-en>
- Observasi Lapangan. (2026). Catatan observasi terstruktur Maret–April 2026 [Dokumen tidak dipublikasikan].
- Pemerintah Desa Tema Tana. (2025). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 [Dokumen tidak dipublikasikan].
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
- Razak, M. R. R., B, S., Sofyan, W., Lubis, S., Ahmad, J., & Karunia, R. L. (2026). Bridging global evidence and local realities: The Rais-MR3 digital governance model for transforming village fund management. *Frontiers in Sustainability*, 7, 1811625. <https://doi.org/10.3389/frsus.2026.1811625>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 39, 355–374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Touchton, M., McNulty, S., & Wampler, B. (2023). Participatory budgeting and community development: A global perspective. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 520–536. <https://doi.org/10.1177/00027642221086957>